



Satu Peta ke Satu Pintu, untuk Kaltim yang Lebih Maju

Pernah membayangkan, sebuah ijin pengelolaan lahan untuk tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ternyata berada di areal permukiman? Percaya atau tidak, hal tersebut terjadi di Kalimantan Timur, salah satu provinsi yang memang terkenal dengan sumber daya alam mineralnya.

Syahdan, salah satu perusahaan multinasional mendapatkan ijin tambang yang prosesnya dilakukan lewat pemerintah pusat. Tidak ada masalah dalam proses penerbitan ijin tersebut. Masalah baru muncul ketika lokasi tambang sesuai ijin yang keluar itu dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Ternyata, lokasi ijin tersebut tidak semuanya berada di lahan kosong. Ada beberapa bagian yang masuk ke lokasi perumahan penduduk.

Kekeliruan itu terjadi karena proses pengeluaran ijin dilakukan pusat dengan menggunakan peta yang tidak mutakhir. Kekeliruan-kekeliruan seperti inilah yang kemudian berusaha diperbaiki oleh provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan informasi geospasial dan teknologi informasi untuk pengelolaan tata ruang dan perijinan.

Tahun 2013, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) menandatangani kerjasama untuk mendukung program tersebut. Kerjasama itu adalah dalam bentuk pendataan geospasial yang memanfaatkan alat-alat canggih. Berawal dari pemetaan hingga nanti berujung pada penyajian satu data yang jadi patokan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Sebelum adanya kerjasama ini, kami memang kesulitan dalam pengumpulan data dan pemetaan,” kata DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si, kepala Bappeda provinsi Kalimantan Timur.

Karenanya, pemerintah Kalimantan Timur menerima tawaran kerjasama tersebut dengan tangan terbuka. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kalimantan Timur menganggarkan biaya sebesar lebih kurang Rp.16 miliar untuk mendukung program tersebut. Dana itu termasuk kegiatan operasional di lapangan, pengadaan beberapa alat untuk pemetaan seperti: GPS, drone, pesawat tanpa awak untuk pemetaan (UAV), hingga penyiapan server dan ruang khusus pengolahan data geospasial tersebut. GIS membantu pelaksanaan di



lapangan termasuk pengadaan perangkat lunak untuk pemetaan.

Selain itu, Bappeda Kalimantan Timur juga menerima bantuan dari dana hibah Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia). Bantuan tersebut berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Beberapa perangkat keras yang digunakan oleh Bappeda sekarang berupa server sebagai pusat penyimpanan data dan beberapa unit komputer. Sementara perangkat lunak bantuan MCA-Indonesia adalah perangkat lunak yang memudahkan proses penyimpanan dan pengolahan data geospasial.

Dana besar itu sudah bisa dirasakan manfaatnya sekarang. Sebelum adanya peta geospasial hasil kerjasama dengan BIG, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan peta, masing-masing melakukannya sendiri-sendiri. Proses ini menimbulkan risiko terjadinya tumpang tindih pemetaan karena koordinasi yang tidak berasal dari satu pintu.

Sekarang, dengan adanya kerjasama antara pemerintah Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bappeda dengan BIG dan bantuan MCA-Indonesia, peta rujukan menjadi satu pintu. Beberapa dinas yang membutuhkan peta sekarang sudah bisa merujuk kepada peta dan data yang dimiliki oleh Bappeda.

Peta yang dimiliki oleh Bappeda adalah peta paling mutakhir tahun 2016 dengan

resolusi tinggi yang bisa diperbesar hingga 1:2500. Dengan data ini, pemerintah daerah sudah bisa melihat dengan jelas kondisi di lapangan, apalagi data-data koordinat memang sudah lengkap dengan beragam atribut seperti kondisi lahan, ketinggian dan batas-batasnya.

Data yang dikumpulkan dalam satu server dan peta yang mutakhir ini bisa juga diakses di pusat, tentu dengan melewati pintu BIG. Zairin Zain memberi contoh, bila Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PK2PB) ingin menerbitkan ijin, maka mereka cukup mengecek peta dan data Kalimantan Timur yang ada di BIG. Cara ini tentu akan menghindarkan kesalahan dan tumpang tindih pemanfaatan lahan seperti kasus yang diceritakan di awal.

Bukan Baru Sekarang

Pemetaan geospasial di Kalimantan Timur ternyata bukan baru sekarang dilakukan. Menurut Zairin Zain, proses pemetaan sudah dilakukan sejak tahun 1982 bekerjasama dengan beberapa lembaga asing. Bedanya, pemetaan waktu itu dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan manual.

“Kita pakai kamera biasa (menggunakan roll), jadi lantai pesawat dilubangi dan kita foto dari atas,” kata Zairin Zain.

Rupanya, Zairin Zain sebelum menjabat sebagai kepala Bappeda Kalimantan Timur juga



merupakan bagian dari unit pemetaan yang merupakan cikal bakal pusat data dan informasi Bappeda Kalimantan Timur. Proses yang dilakukan sejak tahun 1982 itu juga dilakukan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang di kemudian hari menjadi BIG.

Perjalanan panjang itulah yang kemudian memudahkan ketika Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan BIG di tahun 2013. Semua proses sudah biasa mereka lakukan, tinggal lompatan teknologi saja seperti penggunaan alat dan perangkat lunak yang lebih moderen.

Lompatan teknologi juga terjadi di pengumpulan dan transparansi data. Saat ini semua sudah menggunakan komputer dan perangkat lunak yang memungkinkan mudahnya mengakses data geospasial yang dibutuhkan. Data-data itu juga disatukan. Bila dulunya data geospasial laut (marine) dipisahkan dengan data geospasial darat (land), maka sekarang semua disatukan dan bisa diakses kapan saja.

Dalam proses kerjasama ini juga, beberapa staff dari Bappeda dibekali kemampuan mengoperasikan alat-alat canggih seperti GIS, drone, pesawat UAV hingga mengoperasikan perangkat lunak. Proses pelatihan itu tentu butuh waktu panjang dan dana besar, hasilnya para staff yang sudah dilatih menjadi mahir dan otomatis menjadi aset penting bagi daerah Kalimantan Timur.

“Itu juga alasan kenapa mereka ini kita jaga betul,” kata Charmarijati ST, MSI, kepala UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) Pusat Data dan Informasi, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, kemampuan para staff itu sebagai aset penting daerah dijaga betul jangan sampai tidak terpakai.

Pernyataan ini diutarakannya menjawab pertanyaan tentang kemungkinan para staff yang sudah akrab dengan proses pendataan dan penggunaan data geospasial, akhirnya dimutasi ke tempat lain. Kemampuan yang sudah mereka pelajari akhirnya tidak terpakai, sementara penggantinya butuh waktu lagi untuk belajar dari awal. Ini tentu menjadi proses yang membuang-buang waktu.

Menurut Charmijati yang akrab disapa Ibu Nona, Bappeda Kalimantan Timur beruntung karena pejabat mereka selalu diisi oleh orang-orang yang paham betul soal pentingnya informasi geospasial. Contohnya Zairin Zain yang sekarang menjadi kepala Bappeda, dulunya juga anggota tim unit pemetaan.

Di level kepala pemerintahan provinsi atau gubernur pun sama. Kalimantan Timur selalu dipimpin oleh gubernur yang memandang pentingnya informasi geospasial dalam proses perencanaan dan pemanfaatan ruang. Ini alasan kenapa proses tersebut bisa terus berjalan sejak tahun 1982 hingga sekarang.

Salah satu “resep” untuk meyakinkan pimpinan daerah soal pentingnya data geospasial menurut Charmijati adalah, setiap

kali diundang rapat tentang tata ruang atau rapat lainnya yang membutuhkan data geospasial, Bappeda Kalimantan Timur akan menampilkan data dan peta dengan tampilan menarik.

“Jadi presentasi kita pakai peta, bukan tulisan saja. Lebih efektif dan menarik perhatian,” kata Charmijati. Presentasi ini tentu membuka mata pimpinan daerah betapa pentingnya pemanfaatan data geospasial dalam pembangunan daerah.

Perhatian dan komitmen serius dari pimpinan serta manfaat besar yang dirasakan oleh SKPD dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, menjadi jaminan kalau program pemetaan dan pemanfaatan informasi geospasial di Kalimantan Timur tidak akan berhenti.

Bukan Sekadar Untuk Perijinan

Pemanfaatan data informasi geospasial di Kalimantan Timur ternyata bukan untuk memudahkan perijinan dan pemanfaatan ruang saja. Menurut Charmijati, saat ini Bappeda Kalimantan Timur sedang mengusahakan pemanfaatan data tersebut untuk membuat data kemiskinan.

“Rencananya kita akan menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menuangkan data kemiskinan ke dalam peta,” kata Charmijati.

Data-data itu nantinya akan diintegrasikan ke dalam peta geospasial yang ada sekarang. Data kemiskinan akan digabungkan dengan data-data lain seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan data sosial lainnya. Diharapkan data ini bila sudah lengkap akan memudahkan SKPD terkait ketika akan membuat perencanaan atau merumuskan masalah yang ada di lapangan.

“Sekarang kita sedang kaji kerjasama dengan statistik (BPS), perguruan tinggi

dan BIG agar nanti bisa keluar satu peta,” kata Zairin Zain. “Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun sebenarnya kalau mau menggunakan peta kita jadinya tidak perlu ke lapangan lagi. Mereka bisa lihat langsung kondisi lapangan sesuai koordinat,” tambahnya.

Pemanfaatan data geospasial di Kalimantan Timur saat ini memang sudah sangat terasa manfaatnya. Segala proses perencanaan dan perijinan menjadi lebih mudah dengan akuratnya data geospasial yang didukung oleh peta penginderaan jarak jauh beresolusi tinggi. Segala macam perijinan yang butuh data geospasial tinggal merujuk kepada data yang dimiliki oleh Bappeda, dari situ bisa didapatkan data peruntukan lahan yang tepat sehingga kesimpangsiuran data atau tumpang tindih penggunaan lahan bisa dihindari.

Keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memanfaatkan data geospasial diganjar oleh BIG tahun 2016 dengan Bhumandala Award. Kalimantan Timur menjadi peringkat pertama kategori Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Kalimantan Timur dianggap paling peduli terhadap penggunaan informasi geospasial.

Selama puluhan tahun, pemerintah Kalimantan Timur memang terus menjaga konsistensi mendata dan memanfaatkan informasi geospasial. Dari cara yang sederhana dan belum disentuh teknologi digital, hingga saat ini dengan cara yang lebih moderen dan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mudah diakses. Hasilnya, proses perijinan dan perencanaan pembangunan jadi lebih efektif.

Dari satu peta ke satu pintu, untuk daerah yang lebih maju.



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

